

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis mengenai topik penelitian ini yang membahas mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Sudarmanto (2015:54) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah seputar permasalahan bisa atau tidak kompetensi seseorang dapat ditingkatkan atau diperbaiki. Pertanyaan tersebut cukup penting mengingat semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi”.

Menurut Wirawan (2015:18) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai berikut:

“Sumber daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi”.

Selanjutnya menurut Sudarmanto (2015:49) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

“Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien”.

Selanjutnya menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2012: 40)

kompetensi sumber daya manusia didefinisikan sebagai berikut:

“Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya manusia”.

Kemudian menurut Akhyadi Kaswan (2015:152) menyatakan bahwa:

“Agar dapat mengelola kinerja yang efektif, sangat penting mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan kinerja pegawai. Kinerja pegawai mencerminkan perilaku pegawai di tempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang terdiri dari aspek dalam diri seseorang yakni, pengetahuan, keterampilan atau *skills* dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan yang dijalani yang akan berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga kompeten utama pembentuk kompetensi, yang meliputi:

1. Pengetahuan adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab bekerja.
2. Keterampilan individu adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan baik.
3. Sikap kerja adalah mempunyai kreativitas dalam bekerja dan adanya semangat kerja yang tinggi yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian.

Menurut Sudarmanto (2015:51) adapun komponen-komponen kompetensi yakni sebagai berikut:

Terdapat 5 (lima) komponen kompetensi yang terdiri dari:

1. *Motive* (dorongan); perhatian berulang terhadap pernyataan tujuan, atau kondisi, yang muncul dalam bayangan yang mendorong, memerintahkan atau menyeleksi perilaku individu.
2. *Traits* (ciri, sifat, karakter pembawaan) merupakan pemikiran-pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari kejadian-kejadian.
3. *Self image* (citra diri), merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut.
4. *Social role* (peran sosial), merupakan persepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial atau organisasi yang dimilikinya.
5. *Skills* (keterampilan), merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja.

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Edy Sutrisno (2011: 204) sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*)
Kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan/Keterampilan (*skill*)
Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
4. Nilai (*value*)
Suatu standar perilaku yang telah ditakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lainlain).
5. Sikap (*attitude*)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.

6. Minat (*interest*)

Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas.

Berdasarkan indikator-indikator diatas penulis mengambil indikator terkait variabel X_1 yakni Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan pakar Hutapea dan Thoha (2008: 28) yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2016:251) Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mulyadi (2014: 163), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang engolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:69) definisi sistem pengendalian internal adalah:

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan”.

Pengendalian intern pemerintahan diatur oleh Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses kegiatan atau sistem sosial yang diterapkan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah berupa tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dan jajarannya dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2010:163) tujuan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi.
Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan

- perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
 3. Mendorong efisiensi.
Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

Tujuan pengendalian internal adalah membantu manajemen agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai, COSO (2013: 3) dalam kerangka kerja (*framework*) terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut :

The Framework provides for three categories of objectives, which allow organizations to focus on differing aspects of internal control:

1. *Operations Objectives—These pertain to effectiveness and efficiency of the entity's operations, including operational and financial performance goals, and safeguarding assets against loss.*
2. *Reporting Objectives—These pertain to internal and external financial and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness, transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized standard setters, or the entity's policies.*
3. *Compliance Objectives—These pertain to adherence to laws and regulations to which the entity is subject.*

Berdasarkan tujuan-tujuan dari sistem pengendalian internal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan/organisasi/entitas agar tujuan perusahaan yang ditetapkan agar dapat dicapai, juga laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya serta kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.3 Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013: 4) menyatakan mengenai komponen-komponen pengendalian internal sebagai berikut:

“Internal control consists of five integrated components:

1. *Control Environment*
2. *Risk assessment*
3. *Control Activities*
4. *Information and Communication*
5. *Monitoring*”

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian internal tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur, seperti apa yang dikemukakan oleh COSO (2013: 4-6) menjelaskan mengenai komponen lingkungan pengendalian (*control environment*) sebagai berikut:

“The control environment is the set of standards, processes, and structures that provide the basis for carrying out internal control across the organization. The board of directors and senior management establish the tone at the top regarding the importance

of internal control including expected standards of conduct. Management reinforces expectations at the various levels of the organization. The control environment comprises the integrity and ethical values of the organization; the parameters enabling the board of directors to carry out its governance oversight responsibilities; the organizational structure and assignment of authority and responsibility; the process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive accountability for performance. The resulting control environment has a pervasive impact on the overall system of internal control.”

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas bagi operasi organisasi/instansi dan sistem secara keseluruhan pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Risiko dapat di pahami sebagai kemungkinan terhadap ketidakpastian tentang kejadian atau dampak yang akan terjadi terhadap pencapaian tujuan organisasi, seperti halnya COSO (2013: 4) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko (*risk assesment*) sebagai berikut:

“Risk is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Risk assessment involves a dynamic and iterative process for identifying and assessing risks to the achievement of objectives. Risks to the achievement of these objectives from across the entity are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assesment forms the basis for determining how risks will be managed.”

Dengan begitu, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

COSO (2013: 5) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (control activities) sebagai berikut :

“Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment.”

Bagi organisasi/instansi aktivitas pengendalian dilakukan agar arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan melalui kebijakan dan prosedur.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi diperlukan dalam suatu organisasi/instansi, seperti yang dikemukakan oleh COSO (2013: 5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*information and communication*) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

“Information is necessary for the entity to carry out internal control responsibilities to support the achievement of its objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal control. Communication is the continual, iterative process of providing, sharing, and obtaining necessary information. Internal communication is the means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down, and across the entity.”

Informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan didalam organisasi/instansi untuk menunjang aktivitas perusahaan, guna melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dan mendukung

pencapaian tujuan-tujuannya. Organisasi/instansi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pemantauan dilakukan untuk dasar evaluasi organisasi, COSO (2013:5) menjelaskan mengenai komponen aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

“On going evaluations, separate evaluations, or some combination of the two are used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each component, is present and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on assessment of risks, effectiveness of ongoing evaluations, and other management considerations. Findings are evaluated against criteria established by regulators, recognized standard setting bodies or management and the board of directors, and deficiencies are communicated to management and the board of directors as appropriate”.

Aktivitas pemantauan atau evaluasi digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Menurut Mulyadi (2010:239), unsur pokok pengendalian intern dalam perusahaan adalah:

1. “Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat kedalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ditetapkan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempu oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang
 - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.
 - d. Perputaran jabatan (*job rotating*) Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, sehingga persekongkolan diantara karyawan dapat dihindari.
 - e. Secara periodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
 - f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lainnya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya:
 - a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
 - b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya

2.1.2.4 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:71) ada 5 komponen pengendalian intern, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian intern yang baik.
2. Penaksiran Risiko
Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang di hadapi oleh perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian
Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.
4. Sistem Informasi dan Komunikasi
Akuntansi Sistem informasi dan komunikasi terdiri atas metode-metode dan catatan-catatan yang diadakan untuk mencatat, memproses, meringkas dan melapor transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas dan aktiva-aktiva, hutang-hutang terkait.
5. Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang di harapkan dapat segera di ambil tindakan.

Sementara menurut Mahmudi (2016:254) indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (menguraikan karakteristik sistem pengendalian pemerintah sebagai berikut:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi
- e. Pendelegasian tugas dan wewenang
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
- g. Perwujudan peran pengawas internal
- h. Pengendalian umum
- i. Pengendalian aplikasi
- j. Informasi dan komunikasi
- k. Pemantauan (*monitoring*).

Dari indikator indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator indikator yang akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian saya adalah menggunakan indikator menurut pakar V. Wiratna Sujarweni (2015: 71) yakni Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:13) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang sajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Menurut Azhar Susanto (2013:14) bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah laporan yang mempunyai keakurasian dan kesesuaian dengan kebutuhan dan kelengkapan dari laporan yang dihasilkan”.

Serta menurut Moh. Mahsun, dkk (2016) bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah hasil proses akuntansi keuangan yang berisi laporan keuangan untuk digunakan pihak – pihak yang berkepentingan”.

Kemudian menurut Baldric (2015:12) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

“Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”.

Dari definisi kualitas laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dilakukan melalui pengidentifikasian, pengukuran dan pencatatan dari transaksi ekonomi yang dijadikan sebuah informasi akuntansi untuk memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan dan menghasilkan laporan sehingga dapat memenuhi tujuannya, sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Tujuan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:12), tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut

V. Wiratna. Sujarweni (2015:89) yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.
4. Kelangsungan Operasi Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat Laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada masyarakat. Dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*) Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Selanjutnya tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 89) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan.
2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Moh Mahsun (2015:33) mengemukakan tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan”.

Berdasarkan tujuan-tujuan dari laporan keuangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan yakni, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Mahmudi (2016:11) menjelaskan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan, relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevan laporan keuangan terkait dengan:
 - a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*prediktive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan dan kinerja di masa datang.
 - b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka

- perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang. (*feedback value*).
- c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
2. Andal (*Realiability*). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai berikut:
 - a. Disajikan secara jujur (*faithfulness of persentation*), yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - c. Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensis dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
 3. Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai berbandingan kinerja masa lalu atau perbandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
 4. Dapat dipahami (*understandibility*), artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan”.

Menurut Azhar Susanto (2017:13) kualitas laporan keuangan didapat diperluas menjadi:

1. Efektifitas, berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten, dapat digunakan dan lengkap.
2. Integritas, berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan informasi juga validitasnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
3. Kepatuhan, berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, serta tanggung jawab pihak eksternal.
4. Kebenaran informasi, berkaitan dengan sistem informasi yang menyajikan informasi yang cocok digunakan untuk mengoperasikan dan memberikan pemakai laporan keuangan yang diperlukan oleh pemakai dan badan pemerintah.

Menurut Erlina (2015:30), dan Baldric Siregar (2015:77) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Berdasarkan indikator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti akan mengambil indikator sebagai pembantu dalam pembuatan penelitian ini yang menurut pakar Mahmudi (2016:11) yakni Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002:146) menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan”.

Sementara itu, Abdul Hafiz Tanjung (2014:6) menjelaskan bahwa:

“Salah satu hal mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah”.

Pernyataan pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Enny Kiranyanti, dkk (2016) dan Freddie Lasmara, Sri Rahayu (2016) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Kompetensi Sumber Daya

Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan Freddie Lasmara dan Sri Rahayu (2016), kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya apabila kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan pada seluruh SKPD dilaksanakan dengan baik maka akan menunjang pencapaian kualitas laporan keuangan.

Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lambok Vera Riama Pangaribuan, Firmansyah, Muhammad Danial (2017) berpendapat bahwa, jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), semakin baik kompetensi yang dimiliki setiap individu/semakin kompeten seseorang maka akan menunjang pencapaian kualitas laporan keuangannya yang diinginkan.

1.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu penentu yang cukup berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan selain kompetensi sumber daya manusia yakni sistem pengendalian internal, dimana sistem pengendalian internal dapat mencegah tindakan atau perbuatan kecurangan yang akan merugikan pihak pihak tertentu. Karena itu sistem pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing dengan menyediakan informasi keuangan dan akuntansi yang berkualitas.

Berdasarkan *COSO* (2013):

“Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Sedangkan, Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) menjelaskan bahwa:

”Sistem pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya salah satunya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan”.

Menurut Mahmudi (2016:251) menyatakan bahwa:

“Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat menjadi buruk salah satu penyebab utamanya berasal dari lemahnya sistem pengendalian internal”.

Serta Menurut Mahmudi (2007: 11) sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus di lalui yang di atur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah,

sistem akuntansi di dalamnya mengatur sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat di pengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang di miliki pemerintah.”

Menurut Mulyadi (2010: 19) sebagai berikut:

“Mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Jonny M. Situmorang (2016) dan Ni Nyoman Trisnawati, Dewa Nyoman Wiratmaja (2018), dalam hasil penelitiannya mengemukakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Serta penelitian yang dilakukan juga oleh Rahmadani (2015) menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Penelitian Ni Nyoman Trisnawati dan Dewa Nyoman Wiratmaja, (2018) berpendapat bahwa SPI berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu OPD maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

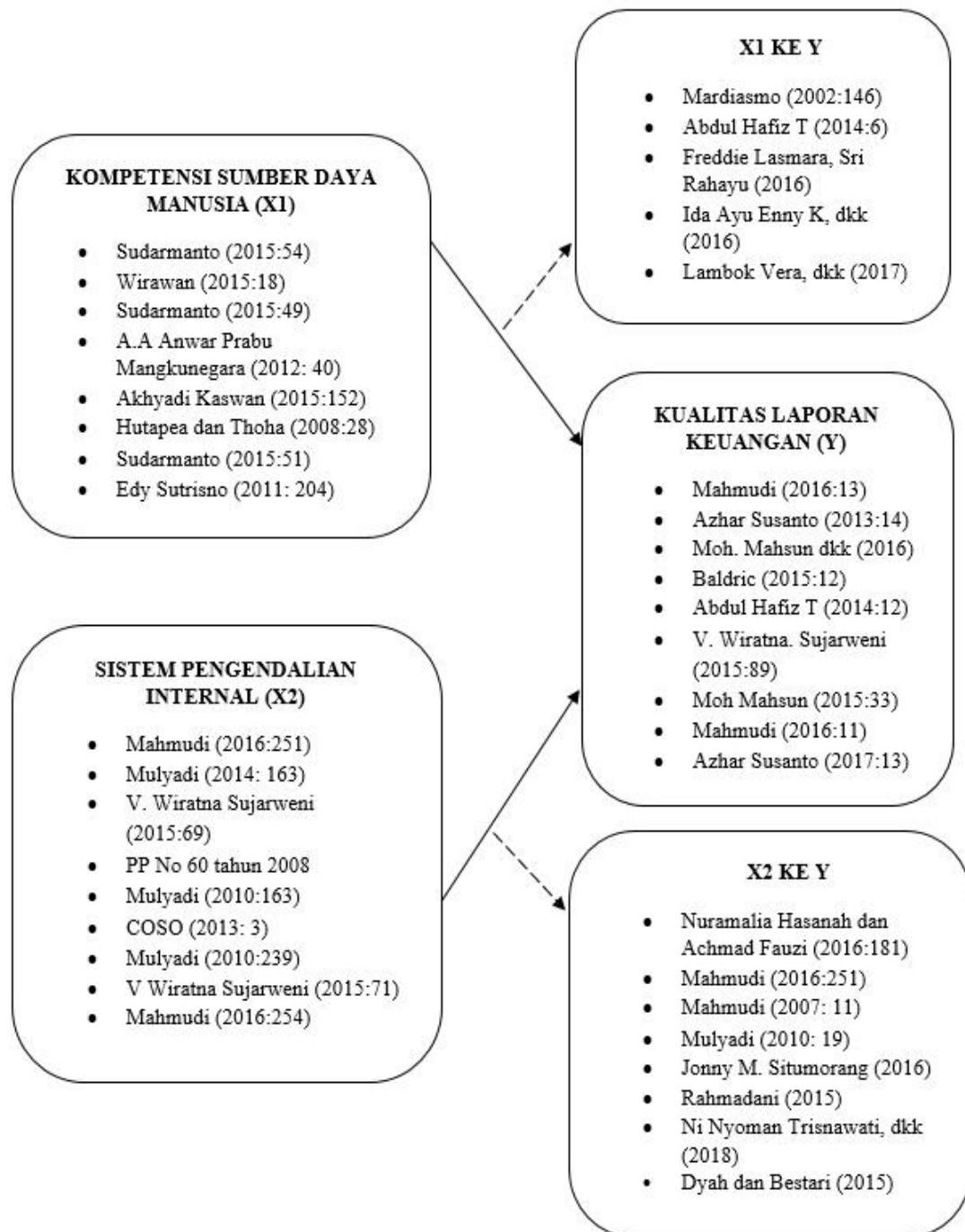
Di dukung juga oleh penelitian Dyah dan Bestari (2015) mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang di terapkan untuk

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta di patuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pemaparan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), jika Sistem Pengendalian Internal diterapkan secara baik maka akan menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan yang baik pula.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan pemaparan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sehingga dapat digambarkan paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa Hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat penelitian yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

- H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.